



## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**(LKJIP)**

**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

**KABUPATEN PURWOREJO**

**TAHUN 2020**



**Disusun oleh :**

**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

**KABUPATEN PURWOREJO**

**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan HidayahNya ,sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo telah dapat kami selesaikan.

Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN, mewujudkan tekad bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia diharapkan dapat sesuai dengan kondisi, potensi, perkembangan dan tatanan masyarakat dengan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,yang selanjutnya disebut LKjIP adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran,yang berupa hasil pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang mengacu pada RPJMD 2016-2021,Kabupaten Purworejo menjadi tolok ukur keberhasilan.

Berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas guna mewujudkan Pemerintahan yang “Good Governance” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tahun 2019,maka untuk mengukur keberhasilan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Bencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo tahun 2019.

Purworejo,

Kepala Dinas Sosial Pengendalian penduduk  
Keluarga Berencana Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Purworejo

dr.Kuswantoro, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP.19621204 198803 1 011

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi.....	2
D. Bagan Organisasi.....	4
E. Isu strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	9
B. Tujuan dan Sasaran.....	10
C. Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019.....	12
B. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan/ kegagalan dan solusi yang di lakukan....	26
C. Akuntabilitas Keuangan.....	36
BAB IV PENUTUP	
A. Capaian Kinerja.....	41
B. Faktor Keberhasilan dan Kendala dalam pencapaian tujuan.....	43
C. Langkah – Langkah untuk mengatasi kendala dan pecapaian tujuan.....	44
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Anggaran Tahun 2021	
- IKU	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Meningkatnya beban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dari waktu ke waktu bersamaan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan dinamika perubahan yang terus berlangsung dengan sendirinya juga memberi konsekuensi pada peningkatan kebutuhan belanja pemerintah. Dalam kondisi keterbatasan potensi sumberdaya yang dimiliki Daerah seperti Kabupaten Purworejo maka tantangan yang dihadapi menjadi semakin terasa berat.

Sementara itu seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat bersamaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi, maka tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good government*) semakin mengemuka. Untuk dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan dalam masyarakat.

Agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta tuntutan perubahan di dalam masyarakat, maka perlu perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar pemerintah dapat senantiasa mengakomodasi kebutuhan perubahan tersebut yang mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*.

LKJIP Dinas sosial pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip – prinsip *good governance*.

### B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Purworejo.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.

### **C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo, Susunan Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi Kesejahteraan dan Nilai Nilai sosial, membawahi :
  - a. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
  - b. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
  - c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Keperintisan.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
  - a. Seksi Rehabilitasi anak dan tuna susial
  - b. Seksi Rehabilitasi Disabilitas dan Lanjut Usia
  - c. Seksi Rehabilitasi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
5. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
  - a. Seksi Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB, dan Pengerakan Ormas
  - b. Seksi Advokasi KIE
  - c. Seksi Pelayanan KB dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi
6. Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Sejahtera, membawahi :

- a. Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk
- b. Seksi Ketahanan Keluarga Sejahtera.

7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
- b. Seksi Pemenuhan Hak Anak
- c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

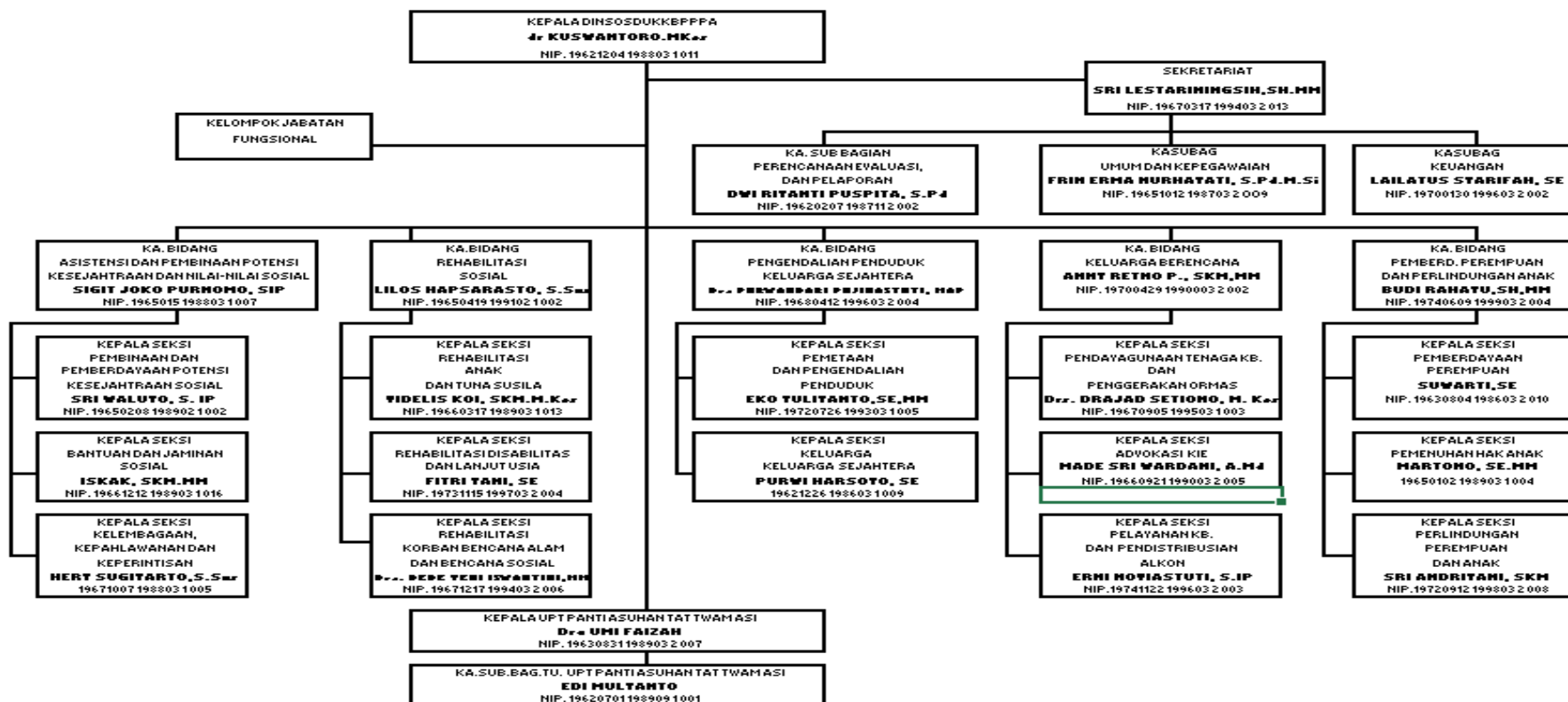
8. UPT Panti Asuhan Tat Twam Asi

## D. Bagan Organisasi

Berikut adalah Bagan Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo .

**BAGAN ORGANISASI**  
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA ,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PURWOREJO

**LAMPIRAN**  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 71 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PURWOREJO



Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

#### 1. Tugas Pokok

DINSOSDUKKBPPPA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang meliputi bidang asistensi dan pembinaan potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang meliputi Asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial, serta pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi Asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi Asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi Asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai-nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga



- sejahtera keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. membina UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu
  - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas – tugas bidang sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi Asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai – nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **E. ISU STRATEGIS**

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan permasalahan yang ada, dengan isu strategis yang ada :

1. Isu strategis urusan sosial
  - a. Belum optimalnya penanganan PMKS
  - b. Masih kurangnya PMKS yang memiliki akses dan ikut berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
  - c. Tingginya masyarakat yang memiliki RTLH
  - d. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS
2. Isu strategis urusan Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah:
 

Pada dasarnya masalah kependudukan berkaitan dengan tiga aspek yaitu: kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Adapun isu strategis terkait program pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera antara lain :

  - a. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
  - b. Masih rendahnya kesadaran kaum pria tentang kesertaan KB
  - c. Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum ikut KB

- d. Tingginya angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun )
  - e. Masih tingginya angka kelahiran pada remaja usia 15 – 18 tahun (ASFR 15 – 19 tahun ) yang disebabkan karena masih kurangnya pemahaman dan kesadaran bagi remaja mengenai kesadaran bagi remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
  - f. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan/ kelompok kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL)
  - g. Belum optimalnya pemberdayaan UPPKS yang merupakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga
  - h. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kependudukan yang tepat dan akurat
3. Isu strategis urusan PPPA
- a. Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat
  - b. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - c. Tingkat capaian Pemenuhan Hak Anak belum optimal
  - d. Penguatan jaringan kelembagaan lembaga layanan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan
  - e. Kapasitas Pengurus Organisasi Perempuan dan Anak masih perlu ditingkatkan
  - f. Belum terbentuknya sistem informasi data gender yang lengkap

## **F. Sistematika Penulisan**

- a. Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, isu strategis, maksud dan tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, dan Sistematika Penulisan LKjIP.
- b. Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis (RPJMD) 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
- d. Bab IV Penutup berisi tentang uraian simpulan umum atas capaian kinerja dan Langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.
- e. Lampiran – lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021
2. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

#### **A. Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016 – 2021 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan, dan ekonomi kerakyatan”.

Guna mencapai visi Kepala Daerah Terpilih, Misi yang relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak tercantum pada 2 misi yaitu misi pertama Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan dan misi yang kedua mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi Kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik terdapat program tentang urusan Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Program Penghargaan Kepahlawanan
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
7. Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak
8. Program Keluarga Berencana (KB)
9. Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana Bagi Pasangan Usia Subur Miskin
10. Program Keluarga Sejahtera

#### **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target-target sasaran pokok pembangunan nasional kedalam kontribusi kabupaten Purworejo dalam pencapaian target-target nasional tersebut.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial, Wajib Bukan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini :

Tabel  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Angka pertumbuhan penduduk
			Cakupan keluarga yang mendapatkan layanan UPPKS
			Cakupan keluarga yang mendapatkan Layanan Tri Bina
		Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		Meningkatnya Kesetaraan Gender, perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			Cakupan Layanan Pemenuhan Hak anak (Indikator Pemenuhan Hak anak)

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi (PK Terlampir)

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Alat ukur yang digunakan adalah tabel target PK Tahun 2020 dan Realisasi PK Tahun 2020.

Catatan intepretasi : **Tercapai (O)** warna hijau,jika realisasi lebih besar dari target ( $\geq 100\%$ ); **Akan Tercapai ( $\Rightarrow$ )** warna kuning, jika realisasi  $\geq 90\%$  s.d.  $100\%$  dari target dan;**Tidak Tercapai ( $\leq$ )** warna merah, jika realisasi  $< 90\%$  dari target.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

a) Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2018 dan 2019)

Alat ukur yang digunakan adalah Tabel Realisasi Kinerja 2020 dan Tahun-tahun sebelumnya (2018 dan 2019).

Catatan intepretasi:

**Relevan** warna hijau, jika Realisasi Kinerja Tahun 2020 trendnya **sesuai** dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2018 dan 2019) (Realisasi Kinerja Tahun 2020 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2018 dan 2019) dan

**Tidak Relevan** warna merah, jika Realisasi Kinerja Tahun 2020 trendnya **tidak sesuai** dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2018 dan 2019) (Realisasi Kinerja Tahun 2020 sama

dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2018 dan 2019).

- b) Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2018 dan 2019)

Alat ukur yang digunakan adalah Capaian Kinerja 2020 dan Tahun-tahun sebelumnya (2018 dan 2019).

Catatan intepretasi:

**Efektif** warna hijau, jika Capaian Kinerja Tahun 2020 trendnya **sesuai** dengan Capaian Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2018 dan 2019). Keterangan : (Capaian Kinerja Tahun 2020 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2018, dan 2019) dan;

**Tidak Efektif** warna merah, jika Capaian Kinerja Tahun 2020 trendnya **tidak sesuai** dengan Capaian Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2018 dan 2019). Keterangan : (Capaian Kinerja Tahun 2020 lebih kecil dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2018, dan 2019).

- 3) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Alat ukur yang digunakan adalah tabel realisasi PK Tahun 2020, target Tahun 2020 pada RPJMD 2016-2021 dan Target akhir tahun (Tahun 2021) pada RPJMD 2016-2021.

Catatan intepretasi:

- a) **Tercapai (O)** warna hijau, jika realisasi Tahun 2020 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target akhir tahun (Tahun 2021);
- b) **Akan Tercapai ( $\Rightarrow O$ )** warna kuning, jika realisasi Tahun 2020 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target tahun 2018tetapi dibawah target akhir tahun (Tahun 2021);
- c) **Tidak Tercapai ( $\leq$ )** warna merah, jika realisasi tidak tercapai sesuai target tahun 2020.

- 4) Perhitungan capaian kinerja sasaran strategis

Catatan intepretasi:

- a) **Tercapai (O)** warna hijau, jika semua (100%) IKU sasaran strategis tercapai;
- b) **Akan Tercapai ( $\Rightarrow O$ )** warna kuning, jika rata-ratanilai IKU sasaran strategis  $\geq 90\%$



- c) **Tidak Tercapai** ( $\leq$ ) warna merah, jika rata-rata nilai IKU sasaran strategis  $< 90\%$ .
- 5) Perhitungan capaian kinerja Pemerintah Daerah
- Rumus Nilai capaian kinerja Pemerintah Daerah (N\_LkjIP) =
- (Jumlah Sasaran Strategis berstatus Tercapai + Akan Tercapai)
- Jumlah Sasaran Strategis
- Hasil penilaian kinerja N\_LKjIP, dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut :
- a)  $90\% > N\_LKjIP \leq 100\%$  dikategorikan Sangat Baik
  - b)  $80\% > N\_LKjIP \leq 90\%$  dikategorikan Baik
  - c)  $60\% > N\_LKjIP \leq 80\%$  dikategorikan Cukup atau Normal
  - d)  $50\% > N\_LKjIP \leq 60\%$  dikategorikan Kurang
  - e)  $N\_LKjIP \leq 50\%$  dikategorikan Sangat Kurang

Tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2020 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut ini.

**A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja Tahun 2020			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya dukungan kinerja program	Cakupan dukungan terhadap kinerja Pemerintah daerah	100	100	100	O
2	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Angka Pertumbuhan Penduduk	0.35	0,26	0,26	<
		Cakupan Keluarga yang mendapatkan layanan UPPKS	2.70	2.70	2.70	O
		Cakupan Keluarga yang mendapatkan Layanan Tri Bina	62.07	62.00	62.00	=>
3	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100	100	100	O

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja Tahun 2020			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian %	
4	Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	93.2	90.00	90.00	=>
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.96	68.91	68.91	=>
		Cakupan layanan pemenuhan hak anak	78.00	75.00	75.00	=>

Analisis capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 3.2 Pencapaian kinerja Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Cakupan dukungan terhadap kinerja pemerintah daerah	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Capaian Kinerja Tahun 2019										100%	O
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2018 dan 2019										100%	relevan
		Hasil Perbandingan Capaian KinerjaTahun 2020 terhadap Tahun 2018 dan 2019										100%	efektif
		Capaian Kinerja s.d. 2020 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)										100%	=>O
Capaian 2018 terhadap Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capaian Sasaran										100%	O

Indikator Kinerja 1 ini bertujuan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam bupati Purworejo yaitu mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja  
Keberhasilan sasaran strategis “ Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah” disebabkan :
  - 1) Tingginya pemahaman mengenai tugas dari masing – masing pejabat pemerintah daerah
  - 2) Sarana dan Prasarana yang memadai yang akan mempermudah pekerjaan
- b. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan  
Keberhasilan capaian pernyataan kinerja DINSOSDUKKBPPPA ini didukung dengan adanya program sebagai berikut :

NO	PROGRAM
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
4	Program Penyusunan Data Dasar

Tindak lanjut kedepan untuk mewujudkan tata kelola kinerja agar menjadi lebih maju adalah :

- 1) Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam pemerintahan dimulai dari tingkat individu, lalu menuju kelompok, setelah itu baru dalam organisasi. Hal tersebut bertujuan setiap individu dapat mengembangkan kemampuannya dan mempermudah pekerjaan.
- 2) Meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator kinerja kunci (IKK ).
- 3) Tata kelola pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan kinerja yang lebih baik

Tabel 3.3 Pencapaian kinerja Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Angka Pertumbuhan Penduduk	0.36 %	0.36	100	0.36	100	0.36	100	0.35	0.26	74.2	0.35		
		Capaian Kinerja Tahun 2020										74.2%	<

		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2018 dan 2019										72.2%	Tidak relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2018 dan 2019										72.2%	Tidak efektif
		Capaian Kinerja s.d. 2020 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)										100%	O
Capaian 2019 terhadap Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capaian Sasaran										79.65%	<

Indikator Kinerja 2 ini bertujuan mengendalikan masalah yang berkaitan dengan kependudukan yang berkaitan dengan tiga spek : kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. Indikator kinerja ke 2 ini sesuai dengan misi bupati “Mewujudkan kabupaten purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan” .

- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
- Keberhasilan indikator sasaran kinerja no 2 yaitu :
- 1) Pasangan Usia Subur yang sudah mulai ber KB

2) Tersedianya data dan informasi kependudukan yang tepat dan akurat
- b. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan
- Keberhasilan capaian pernyataan kinerja DINSOSDUKKBPPPA ini didukung dengan adanya program sebagai berikut :
- NO

PROGRAM

1      Program Keluarga Berencana

Tindak lanjut kedepan :

- 1) Sosialisasi terhadap kaum pria mengenai pemahaman ber KB ditingkatkan
- 2) Pemahaman dan kesadaran bagi remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga lebih di tingkatkan

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Cakupan keluarga yang mendapat layanan	2.69	2,7	103	2,71	100	3.76	139	2.70	-	-	2.70		

UPPKS													
		Capaian Kinerja Tahun 2020										-	
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2018 dan 2019										-	
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2018 dan 2019										-	
		Capaian Kinerja s.d. 2020 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)										-	
Capaian 2018 terhadap Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capaian Sasaran											

Indikator Kinerja 3 ini sesuai dengan misi bupati “ Mewujudkan kabupaten purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan” .

- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
- Keberhasilan indikator sasaran kinerja no 3 yaitu :
- 1) Kesejahteraan keluarga meningkat dengan usaha ekonomi produktif

2) Mengelola usaha dari yang berskala kecil menjadi besar dan sebagai tempat belajar bagaimana mengupayakan keterampilan untuk berusaha/menghasilkan produk yang dapat mendatangkan keuntungan bagi anggota yang bergabung dalam UPPKS
- b. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan
- Keberhasilan capaian pernyataan kinerja DINSOSDUKKBPPPA ini didukung dengan adanya program sebagai berikut :
- NO

PROGRAM

1      Program Keluarga Sejahtera

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Cakupan keluarga yang mendapatkan layanan tri bina	60.33	60.33	100	-	-	63.76	96.83	62.07	62.00	99.88	63.00		
		Capaian Kinerja Tahun 2019										99.88%	=>

		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Tahun 2017 dan 2018										97.23%	sesuai
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Tahun 2017 dan 2018										98.35%	sesuai
		Capaian Kinerja s.d. 2019 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)										98.52%	=>0
Capaian 2018 terhadap Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capaian Sasaran										98.49%	=>

Indikator Kinerja 4 ini sesuai dengan misi bupati “ Mewujudkan kabupaten purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan” .

- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja  
Keberhasilan indikator sasaran kinerja no 4 yaitu :
- 1) Optimalnya pemberdayaan kelembagaan/ kelompok kegiatan Tribina (BKB,BKR,BKL)
  - 2) Setiap orang tua melakukan gerakan Bina Keluarga Balita (BKB)
- b. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan  
Keberhasilan capaian pernyataan kinerja DINSOSDUKKBPPPA ini didukung dengan adanya program sebagai berikut :
- | NO | PROGRAM                    |
|----|----------------------------|
| 1  | Program Keluarga Sejahtera |

**Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja 5**

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Cakupan penanganan penyandang kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	97.1	97.1	100		
		Capaian Kinerja Tahun 2020										97.1%	=>
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2018 dan 2019										97.1%	sesuai
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2018 dan 2019										97.1%	sesuai
		Capaian Kinerja s.d. 2019 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)										97.1%	=>

Capaian 2018 terhadap Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capaian Sasaran										97.1%	=>

Indikator Kinerja 5 ini sesuai dengan misi bupati “ Mewujudkan kabupaten purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan” .

- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
- Keberhasilan indikator sasaran kinerja no 5 yaitu :
- 1) Optimalnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS
  - 2) Banyaknya PMKS yang memiliki akses dan ikut berpartisipasi dalam kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
  - 3) Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan
- Keberhasilan capaian pernyataan kinerja DINSOSDUKKBPPPA ini didukung dengan adanya program sebagai berikut :

NO	PROGRAM
1	Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial
2	Program Penghargaan Kepahlawanan

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja 6

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.81	92.81	99.03	94.17	100	90.00	96.67	93.2	90.00	96.56	93.4		
		Capaian Kinerja Tahun 2020										96.56%	=>
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2018 dan 2019										97.74%	sesuai
		Hasil Perbandingan Capaian KinerjaTahun 2020 terhadap Tahun 2018 dan 2019										98.19%	sesuai
		Capaian Kinerja s.d. 2020 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)										96.72%	=>
Capaian 2018 terhadap Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capaian Sasaran										97.30%	=>

Indikator Kinerja 6 ini sesuai dengan misi bupati “ Mewujudkan kabupaten purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan” .

- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
- Keberhasilan indikator sasaran kinerja no 6 yaitu :
- 1) Kualitas pendidikan antara laki – laki dan perempuan seimbang

2) Presentase melek huruf di kalangan perempuan tinggi

3) Presentase perempuan bekerja tinggi

4) Penguasaan sumber daya ekonomi bagi perempuan
- b. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan
- Keberhasilan capaian pernyataan kinerja DINSOSDUKKBPPPA ini didukung dengan adanya program sebagai berikut :
- NO

PROGRAM

1

Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja 7													
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.81	68.76	99.92	70.58	102	60.00	87.07	68.96	68.91	99.92	69.05		
		Capaian Kinerja Tahun 2020										99.92%	=>
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2018 dan 2019										105 %	relevan
		Hasil Perbandingan Capaian KinerjaTahun 2020 terhadap Tahun 2017 dan 2019										105%	efektif
		Capaian Kinerja s.d. 2020 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)										99.86 %	=>O
Capaian 2018 terhadap Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capaian Sasaran										102 %	O

Indikator Kinerja 7 ini sesuai dengan misi bupati “ Mewujudkan kabupaten purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan” .

- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja



Keberhasilan indikator sasaran kinerja no 7 yaitu :

- 1) Banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat berperan penting dalam pengambilan keputusan
- 2) Perempuan mendapatkan hak suara dalam bidang politik
- 3) Perempuan sebagai tenaga profesional, manager, administrasi dan teknis

b. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan capaian pernyataan kinerja DINSOSDUKKBPPPA ini didukung dengan adanya program sebagai berikut :

NO	PROGRAM
1	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja 8

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Cakupan Layanan Pemenuhan Hak anak	7.0	67.20	96	73	101	75	98.6	78	75	96.15	85		
		Capaian Kinerja Tahun 2020										96.15 %	=>
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2018 dan 2019										101 %	relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2018 dan 2019										96.34%	sesuai
		Capaian Kinerja s.d. 2020 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2021)										91.7 %	=>O
Capaian 2018 terhadap Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capaian Sasaran										96.29%	=>

Indikator Kinerja 8 ini sesuai dengan misi bupati “ Mewujudkan kabupaten purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan” .

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan indikator sasaran kinerja no 8 yaitu :

- 1) Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak sedikit
- 2) Terpenuhi secara optimal pemenuhan hak anak

3) Lembaga yang menangani kekerasan menindaklanjuti kasus dengan tegas

b. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan capaian pernyataan kinerja DINSOSDUKKBPPPA ini didukung dengan adanya program sebagai berikut :

NO	PROGRAM
1	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program dan kegiatan urusan sosial wajib pelayanan dasar yang direalisasikan DINSOSDUKKBPPPA Kabupaten Purworejo pada tahun 2020

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
A	Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 603.224.800	Rp 517.632.145	85,81	
a.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 40.049.200	Rp 39.878.400	99,57	
b.	Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan	Rp 49.521.000	Rp 47.008.150	94,93	
c.	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 102.235.000	Rp 67.210.766	65,74	1. Peralatan listrik tidak banyak mengalami gangguan, 2. disamping PDAM sudah ada sumur Bor 3. Untuk pemakaian telepon memang jarang di gunakan semenjak adanya aplikasi whatsapp
d.	Pengelolaan Keamanan Kantor	Rp 36.456.800	Rp 34.235.400	93,91	
e.	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Rp 232.822.000	Rp 193.529.267	83,12	Undangan Rakor untuk perjalanan Dinas Luar Daerah sangat berkurang. 2. hanya sedikit tamu dari OPD Luar daerah yang koordinasi dan konsultasi di Dinas kami karena Purworejo termasuk Kabupaten Merah (Covid 19) untuk SPJ Jamuan Tamu

f.	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi	Rp 142.140.800	Rp 135.770.162	95,52	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 286.352.800	Rp 261.101.562	91,18	
a.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 69.880.200	Rp 69.738.000	99,8	
b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 148.817.600	Rp 137.854.262	92,63	ada sejumlah 3 kendaraan dinas roda 2 dan ada 1 kendaraan roda 4 yang ditahun ini belum waktunya ganti Plat
c.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana UPT	Rp 15.727.000	Rp 15.724.900	99,99	
d.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 51.928.000	Rp 37.784.400	72,76	Karena adanya WFH berdampak pada alat perlengkapan kantor seperti komputer, printer, laptop, AC jarang di operasionalkam sehingga mengurangi kerusakan adapun ada perawatan hanya sebagain saja
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 92.013.400	Rp 85.266.850	92,67	Adanya pandemi covid tidak ada undangan baik dalam dan luar daerah, semua memakai video converent
a.	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Rp 40.171.000	Rp 40.154.950	99,96	
b	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Rp 51.842.400	Rp 45.111.900	87,02	Adanya pandemi covid tidak ada undangan baik dalam dan luar daerah, semua memakai video converent
IV	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Rp 14.992.000	Rp 10.086.800	67,28	Adanya pandemi covid tidak ada undangan baik dalam dan luar daerah, semua memakai video converent
a.	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Rp 14.992.000	Rp 10.086.800	67,28	Adanya pandemi covid tidak ada undangan baik dalam dan luar daerah, semua memakai video converent
V	Program Keluarga Berencana (KB)	Rp 7.651.961.000	Rp 7.073.962.267	92,45	
a.	Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi KKB (KIE KKB)	Rp 120.617.000	Rp 119.996.850	99,49	

b.	Pelayanan Keluarga Berencana	Rp 127.381.400	Rp 119.472.300	93,79	BBM diperuntukan untuk genset Bus Muyan, Tidak Dapat Dibelanjakan karena selama pandemi covid tidak ada pelayanan safari KB dengan menggunakan Bus Muyan, Sisa SPPD luar Daerah tidak dapat diserap secara maksimal karena selama pandemi covid 19 rapat dilaksanakan dengan virtual meeting, fotocopy tidak dapat diserap maksimal karena menyesuaikan dengan kondisi spj dan proses surat menyurat yang dilakukan secara elektronik
c.	Dukungan Updating Data Keluarga	Rp 30.697.000	Rp 30.696.700	100	
d.	Pengembangan Kelompok KB Pria	Rp 2.110.400	Rp 2.097.800	99,4	
e.	Monitoring Evaluasi Kepesertaan KB	Rp -	Rp -	0	
f.	Pendayagunaan Penyuluh KB dan Organisasi Masyarakat	Rp 22.619.200	Rp 21.810.800	96,43	
g.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Rp -	Rp -	0	
h.	Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan KB Mandiri	Rp -	Rp -	0	
i	Pengadaan Sarana PPKBD dan Sub PPKBD (DAK)	Rp 484.000.000	Rp 373.768.950	77,22	sisa lelang
j	Bantuan Operasional KB (BOKB) DAK	Rp 6.214.636.000	Rp 5.793.225.567	93,22	Sisa anggaran dari biaya langganan listrik, internet, dan pembelanjaan BBM, sisa anggaran dari kegiatan pertemuan di 41 kampung kb mengingat kondisi pandemi covid sehingga pertemuan mengumpulkan masyarakat tidak maksimal, juga ada kader yang sebagian besar masyarakatnya terpapar covid sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
k.	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB (DAK)	Rp 198.900.000	Rp 190.086.900	95,57	
l.	Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data (DAK)	Rp 451.000.000	Rp 422.806.400	93,75	sisa pengadaan
VI	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Rp 242.990.200	Rp 242.314.917	99,72	
a.	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Rp 32.205.400	Rp 32.205.350	100	

b.	Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Rp 60.817.000	Rp 60.804.711	99,98	
c.	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Rp 31.283.000	Rp 31.184.806	99,69	
d.	Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak	Rp 32.169.800	Rp 32.161.350	99,97	
e.	Operasional Taman Cerdas	Rp 52.265.800	Rp 52.265.600	100	
f.	Dukungan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Rp 15.826.600	Rp 15.621.100	98,7	
g.	Penguatan Kelompok kerja PUG	Rp 214.600	Rp 213.100	99,3	
h.	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Untuk Desa	Rp -	Rp -	0	
i.	Fasilitasi Pembinaan DWP dan GOW	Rp 18.208.000	Rp 17.858.900	98,08	
VII	Program Penanganan dan Perberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rp 1.343.626.500	Rp 1.281.349.999	95,37	
a.	Fasilitasi dan Penanganan Bekas Warga Lembaga Perasyarakatan (BWLP), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Rp 27.790.500	Rp 27.527.200	99,05	
b.	Fasilitasi Program Keluarga Harapan	Rp 130.000.000	Rp 125.506.000	96,54	
c.	Pengadaan Perlengkapan Sekretariat Program Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Rp -	Rp -	0	
d.	Fasilitasi Penanganan Korban Bencana	Rp 124.885.800	Rp 123.081.600	98,56	
e.	Penanganan Pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak terlantar luar panti	Rp 32.039.400	Rp 31.579.050	98,56	
	Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi	Rp 200.585.000	Rp 200.107.675	99,76	
f.	Validasi sasaran Program Penanganan Fakir Miskin	Rp 280.668.000	Rp 268.406.524	95,63	
h.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Bermasalah	Rp 30.883.400	Rp 30.398.800	98,43	
i.	Operasional Rumah Singgah Untuk PMKS	Rp 22.543.400	Rp 22.102.400	98,04	
j.	Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Rp 124.637.000	Rp 118.922.800	95,42	

k.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin	Rp 108.464.000	Rp 91.457.000	84,32	Sisa perjalanan dinas luar , tidak ada rakor, bintek, sosialisasi dari Provinsi karena pandemi
l.	Fasilitasi Kelembagaan dan Organisasi Sosial	Rp 261.130.000	Rp 242.260.950	92,77	Sisa perjalanan dinas luar , tidak ada rakor, bintek, sosialisasi dari Provinsi karena pandemi
m.	Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota (DAK)	Rp -	Rp -		
VIII	Program Keluarga Sejahtera	Rp 124.034.000	Rp 122.572.800	98,82	
a.	Pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Rp 32.375.600	Rp 31.972.600	98,76	
b.	Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Paripurna	Rp 48.168.800	Rp 47.377.350	98,36	
c.	Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna	Rp 35.814.600	Rp 35.651.850	99,55	
d.	Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna	Rp 7.675.000	Rp 7.571.000	98,64	
IX	Program Peningkatan Kepsertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin	Rp 3.289.200	Rp 3.289.200	100	
a.	Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana Bagi Keluarga Miskin	Rp 3.289.200	Rp 3.289.200	100	
X	Program Penghargaan Kepahlawanan	Rp 62.288.300	Rp 58.306.650	93,61	
a.	Pemberian Tali Asih Keluarga Perintis dan Veteran	Rp 19.080.000	Rp 18.692.700	97,97	
b.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Rp 43.208.300	Rp 39.613.950	91,68	Evisiensi anggaran
		Rp 10.424.772.200	Rp 9.655.883.190	92,62	

**B. ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN / KEGAGALAN DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN**

Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan.

Dalam tahun 2020 capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo

mencapai 92,62 % dengan indikator dan sasaran yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut :

### Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi Yang telah Dilakukan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	%	100%
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 bulan , 100%	Jasa Kebersihan, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 bulan, 100%	100%
			Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 bulan , 100%	Layanan surat-menyurat dan kearsipan, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 bulan, 100%	100%
			Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 bulan , 100 %	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 bulan, 100 %	100%
			Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan Keamanan Kantor, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 bulan , 100%	Layanan Keamanan Kantor, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 bulan, 100%	100%
			Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 bulan , 100 %	Layanan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 bulan, 100 %	100%



			Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Tat Twam Asi, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 bulan , 100 %	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Tat Twam Asi, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 bulan, 100 %	100%
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100		100%
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	3 Unit/Th, 100 %	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	3 Unit/Th, 100 %	100%
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	159 unit/Th, 100 %	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	159 unit/Th, 100 %	100%
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana UPT	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	15 paket , 100 %	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	15 paket, 100 %	100%
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala, Cakupan dukungan terhadap kinerja Perangkat Daerah	8 Unit/Th, 100 %	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala, Cakupan dukungan terhadap kinerja Perangkat Daerah	8 Unit/Th, 100 %	100%
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	%	100	%	100%
			Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	19 Dok, 100 %	Dokumen pelaporan keuangan, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	19 Dok, 100 %	100%

			Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 Dok, 100 %	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	12 Dok, 100 %	100%
			Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	100	%	100	%	100%
			Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	1 Dok, 100 %	Dokumen data dasar pembangunan, Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	1 Dok, 100 %	100%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Keluarga Berencana (KB)	10.60	%	10.60		100%
			Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi KKB (KIE KKB)	Terlaksananya kegiatan pelayanan KIE KKB, Cakupan Peserta KB Aktif	100 Desa, 0 %	Terlaksananya kegiatan pelayanan KIE KKB, Cakupan Peserta KB Aktif	100 Desa, 0 %	100%
			Pelayanan Keluarga Berencana	Pemasangan kontrasepsi, Pelaksanaan MOP dan MOW, Cakupan Peserta KB Aktif	800 Akseptor, 40 Orang, 0 %	Pemasangan kontrasepsi, Pelaksanaan MOP dan MOW, Cakupan Peserta KB Aktif	800 akseptor	100%
			Dukungan Updating Data Keluarga	Update data keluarga , Cakupan Peserta KB Aktif	1 Dok, 0 %	Update data keluarga , Cakupan Peserta KB Aktif	1 Dok, 0 %	100%
			Pengembangan Kelompok KB Pria	Jumlah Kelompok KB Pria, Cakupan Peserta KB Aktif	1 Kel, 0 %	Jumlah Kelompok KB Pria, Cakupan Peserta KB Aktif	1 Kel, 0 %	100%
			Monitoring Evaluasi Kepesertaan KB	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelayanan KB, Cakupan Peserta KB Aktif	56 Orang, 0 %	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelayanan KB, Cakupan Peserta KB Aktif	0	0%

			Pendayagunaan Penyuluh KB dan Organisasi Masyarakat	Penilaian Angka Kredit PKB, Penggerakan KB bagi Ormas, Cakupan Peserta KB Aktif	71 Org, 25 Org	Penilaian Angka Kredit PKB, Penggerakan KB bagi Ormas, Cakupan Peserta KB Aktif	71 Org, 25 Org	100%
			Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja, Cakupan Peserta KB Aktif	300orang, 0%	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja, Cakupan Peserta KB Aktif	0	0%
			Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan KB Mandiri	Monitoring dan Evaluasi Peserta KB Mandiri, Cakupan Peserta KB Aktif	24 faske s,0%	Monitoring dan Evaluasi Peserta KB Mandiri, Cakupan Peserta KB Aktif	0	0%
			Pengadaan Sarana PPKBD dan Sub PPKBD (DAK)	Sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD, Cakupan Peserta KB Aktif	121 paket , 0 %	Sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD, Cakupan Peserta KB Aktif	121 paket, 0 %	100%
			Bantuan Operasional KB (BOKB) DAK	Operasional Balai Penyuluhan KB dan Pendistribusian Alkon, Cakupan peserta KB Aktif	16 Balai , 0 %	Operasional Balai Penyuluhan KB dan Pendistribusian Alkon, Cakupan peserta KB Aktif	16 Balai , 0 %	100%
			Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB (DAK)	Tersedianya tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi, Cakupan Peserta KB Aktif	19 buah, 0 %	Tersedianya tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi, Cakupan Peserta KB Aktif	19 buah, 0 %	100%
			Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data (DAK)	Tersedianya Media/alat Pengolahan Data, Cakupan Peserta KB Aktif	3 Jenis, 0 %	Tersedianya Media/alat Pengolahan Data, Cakupan Peserta KB Aktif	3 Jenis, 0 %	100%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	40	Kel	40	Kel	100%

			Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Koordinasi PPRG, Dokumen Data Pilah Gender, Pelatihan PUG, Penyusunan Dokumen Raperda PUG, Sosialisasi bagi Kepala Desa dan Lembaga Desa dalam Penyusunan Anggaran Desa Berspektif Gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan layanan pemenuhan hak anak (Indikator pemenuhan hak anak)	1 paket, 1 Dok, 10 Kel, 1 paket, 420 Org, 78 %, 38 %, 38 %	Koordinasi PPRG, Dokumen Data Pilah Gender, Pelatihan PUG, Penyusunan Dokumen Raperda PUG, Sosialisasi bagi Kepala Desa dan Lembaga Desa dalam Penyusunan Anggaran Desa Berspektif Gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan layanan pemenuhan hak anak (Indikator pemenuhan hak anak)	1 paket, 1 Dok, 10 Kel, 1 paket, 420 Org, 78 %, 38 %, 38 %	100%
			Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Fasilitasi Lembaga, Penyuluhan penanganan kasus, Fasilitasi Lembaga, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	3 Dok, 50 kasus, 3 Dok, 78 %, 38 %, 38, %	Fasilitasi Lembaga, Penyuluhan penanganan kasus, Fasilitasi Lembaga, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	3 Dok, 50 kasus, 3 Dok, 78 %, 38 %, 38, %	100%
			Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan, Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan Layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	65 kasus, 65 kasus, 78 %, 38 %, 38 %	Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan, Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan Layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	65 kasus, 65 kasus, 78 %, 38 %, 38 %	100%
			Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak	Koordinasi dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak, Fasilitasi Forum Anak Kabupaten Purworejo (FORKARE) Penanganan dan Pemenuhan Hak Anak Bermasalah, Penyuluhan Pemenuhan Hak Anak, Indeks pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan Layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	20 kali, 1 Dok, 10 kasus, 10 orang, 78 %, 38 %, 38 %	Koordinasi dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak, Fasilitasi Forum Anak Kabupaten Purworejo (FORKARE) Penanganan dan Pemenuhan Hak Anak Bermasalah, Penyuluhan Pemenuhan Hak Anak, Indeks pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan Layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	20 kali, 1 Dok, 10 kasus, 10 orang, 78 %, 38 %, 38 %	100%
			Operasional Taman Cerdas	Kebersihan dan Operasional Pendukung Kegiatan di Taman Cerdas, Tenaga Operasional, Listrik, Tenaga Operasional, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan layanan pemenuhan hak anak	12 Keg, 3 Org, 2 reken	Kebersihan dan Operasional Pendukung Kegiatan di Taman Cerdas, Tenaga Operasional, Listrik, Tenaga Operasional, Indeks Pembangunan Gender (IPG),	12 Keg, 3 Org, 2 rekenin g, 3 Org,	100%

				(indikator pemenuhan hak anak)	ing, 3 Org, 78 %,38 %,38 %	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	78 %,38%,3 8%	
			Dukungan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Pelatihan Analisa Sosial, Pembekalan Calon dan Keluarga TKI, Seminar dan Lomba PKH, Koordinasi Pkjatap/Satgas GSIB, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan Layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	3 Kel, 80 Org, 300 Org, 40 Kali, 78%,3 8%,38 %	Pelatihan Analisa Sosial, Pembekalan Calon dan Keluarga TKI, Seminar dan Lomba PKH, Koordinasi Pkjatap/Satgas GSIB, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan Layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	3 Kel, 80 Org, 300 Org, 40 Kali, 78%,38 %,38%	100%
			Penguatan Kelompok kerja PUG	Rakor Pokja PUG, Focal Pount, Tim teknis ARG, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan haka anak)	40 kali, 25 orang , 10 orang ,78%, 38%,3 8%	Rakor Pokja PUG, Focal Pount, Tim teknis ARG, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan haka anak)	40 kali, 25 orang, 10 orang,7 8%,38%, 38%	100%
			Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Untuk Desa	Sosialisasi kegiatan PPRG Desa, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan layanan pemenuhan haka anak (indikator pemenuhan hak anak)	500 kali, 78%,3 8%,38 %	Sosialisasi kegiatan PPRG Desa, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan layanan pemenuhan haka anak (indikator pemenuhan hak anak)	500 kali, 78%,38 %,38%	100%
			Fasilitasi Pembinaan DWP dan GOW	Pertemuan, Pembinaan dan pelatihan petugas dan kader, Pembinaan dan pelatihan petugas dan kader.	4 kali, 20 OK, 420 OK, 78%,3 8%,38 %	Pertemuan, Pembinaan dan pelatihan petugas dan kader, Pembinaan dan pelatihan petugas dan kader.	4 kali, 20 OK, 420 OK, 78%,38 %,38%	100%
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		Program Penanganan dan Perberdayaan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial	20.47	%	20.47	%	100%

			Fasilitasi dan Penanganan Bekas Warga Lembaga Permayarakatan (BWLP), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Bantuan stimulan Modal Usaha (Bansos), Pengiriman ke panti, Pengiriman ke panti, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	6 -, 1 org, 1000 org, 20,37 %	Bantuan stimulan Modal Usaha (Bansos), Pengiriman ke panti, Pengiriman ke panti, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	6 -, 1 org, 1000org, 20,37 %	100%
			Fasilitasi Program Keluarga Harapan	Fasilitasi Pelaksanaan PKH, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	27.000 KPM, 20,37 %	Fasilitasi Pelaksanaan PKH, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	27.000 KPM, 20,37 %	100%
			Pengadaan Perlengkapan Sekretariat Program Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Pengadaan Sarana Prasarana Sekretariat PKH dan TKSK, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	5 paket , 20,37 %	Pengadaan Sarana Prasarana Sekretariat PKH dan TKSK, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0	0%
			Fasilitasi Penanganan Korban Bencana	Fasilitasi kegiatan Penanganan Bencana dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Penetapan Tagana, Distribusi Logistik sampai ke sasaran, Distribusi Logistik samapai ke sasaran, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	4 paket , 45 Org, 16 Kecamatan, 16 Kecamatan, 20,37 %	Fasilitasi kegiatan Penanganan Bencana dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Penetapan Tagana, Distribusi Logistik sampai ke sasaran, Distribusi Logistik samapai ke sasaran, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	4 paket, 45 Org, 16 Kecamatan, 16 Kecamatan, 20,37 %	100%
			Penanganan Pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak terlantar luar panti	Fasilitasi Eks Psikotik, Layanan PGOT, Penguatan Keluarga serta Tokoh Masyarakat, Razia, Terlayannya orang terlantar dan anak terlantar, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	15 Org, 12 bulan , 30 Org, 1 Kali, 5 Org	Fasilitasi Eks Psikotik, Layanan PGOT, Penguatan Keluarga serta Tokoh Masyarakat, Razia, Terlayannya orang terlantar dan anak terlantar, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	15 Org, 12 bulan, 30 Org, 1 Kali, 5 Org	100%

			Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi	Logistik Penerima Manfaat di UPT Tat Twam Asi, Cakupan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	12 bulan ,20,37%	Logistik Penerima Manfaat di UPT Tat Twam Asi, Cakupan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	12 bulan,20,37%	100%
			Validasi sasaran Program Penanganan Fakir Miskin	Verifikasi dan Validasi data Penerima program Penanganan Fakir Miskin, validasi data PMKS dan PSKS, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	16 kecamatan, 20,37%	Verifikasi dan Validasi data Penerima program Penanganan Fakir Miskin, validasi data PMKS dan PSKS, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	16 kecamatan, 20,37%	100%
			Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Bermasalah	Pengiriman anak bermasalah ke panti/balai rehabilitasi sosial, Bantuan sosial bagi Anak Bermasalah, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	5 Org, 10 paket , 20,37%	Pengiriman anak bermasalah ke panti/balai rehabilitasi sosial, Bantuan sosial bagi Anak Bermasalah, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	5 Org, 10 paket, 20,37%	100%
			Operasional Rumah Singgah Untuk PMKS	Operasional Rumah Singgah, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	12 bulan , 20,37%	Operasional Rumah Singgah, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		100%
			Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial KUBE, Fasilitas Jaminan Hidup, Fasilitas mengantar dan menjemput penerima manfaat (disabilitas) ke balai rehabilitasi, panti, dan RS, Penyuluhan lanjut usia, Bantuan Sosial Lanjut Usia Non Potensial, bantuan Modal stimulan Untuk usaha (Bansos) bagi lanjut Usia Potensial, Bantuan alat bantu penyandang disabilitas dan bantuan modal stimulan untuk Usaha Ekonomi, Produktif Disabilitas dan Keluarganya, Fasilitas mengantar dan menjemput penerima manfaat(disabilitas) ke balai rehabilitasi, panti, dan RS, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1 KUBE, 95 Dok, 20 Org, 50 Org, 20 Org, 20,Org, 20 Org, 20,37%	Bantuan Sosial KUBE, Fasilitas Jaminan Hidup, Fasilitas mengantar dan menjemput penerima manfaat (disabilitas) ke balai rehabilitasi, panti, dan RS, Penyuluhan lanjut usia, Bantuan Sosial Lanjut Usia Non Potensial, bantuan Modal stimulan Untuk usaha (Bansos) bagi lanjut Usia Potensial, Bantuan alat bantu penyandang disabilitas dan bantuan modal stimulan untuk Usaha Ekonomi, Produktif Disabilitas dan Keluarganya, Fasilitas mengantar dan menjemput penerima manfaat(disabilitas) ke balai rehabilitasi, panti, dan RS, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1 KUBE, 95 Dok, 20 Org, 50 Org, 20 Org, 20,Org,20 Org, 20,37%	100%
			Fasilitasi Pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin	Fasilitasi dan Pembinaan penerima Bantuan KUBE, Fasilitas dan Pembinaan Penerima Bantuan RS RTLH, Fasilitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Fasilitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan	250 paket , 100 paket , 54.97	Fasilitasi dan Pembinaan penerima Bantuan KUBE, Fasilitas dan Pembinaan Penerima Bantuan RS RTLH, Fasilitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Fasilitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Cakupan	250 paket, 100 paket, 54.975 KPM,	100%

				sosial	5 KPM, 125 KPM, 20,37 %	penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	125 KPM, 20,37%	
			Fasilitasi Kelembagaan dan Organisasi Sosial	Fasilitasi dan pembinaan Panti Sosial, lembaga Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial, Fasilitasi dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Fasilitasi dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Fasilitasi LK3, Fasilitasi dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Fasilitasi Karang Taruna, Fasilitasi Karang Taruna, Fasilitasi Karang Taruna, Fasilitasi Komda Lansia, Fasilitasi Komda Lansia, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	8 paket , 16 paket ,494 paket , 1 lemb aga, 1 paket , 1 paket , 16 paket , 494 paket , 1 paket , 1 paket	Fasilitasi dan pembinaan Panti Sosial, lembaga Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial, Fasilitasi dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Fasilitasi dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Fasilitasi LK3, Fasilitasi dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Fasilitasi Karang Taruna, Fasilitasi Karang Taruna, Fasilitasi Karang Taruna, Fasilitasi Komda Lansia, Fasilitasi Komda Lansia, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	8 paket, 16 paket, 494 paket, 1 lembaga , 1 paket, 1 paket, 16 paket, 494 paket, 1 paket, 1 paket	100%
			Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota (DAK)	0	0	0	0	0%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Keluarga Sejahtera	83.84	%	83.84	%	100%
			Pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan UPPKS, Cakupan Peserta KB Aktif	1.100 PUS, 0%	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan UPPKS, Cakupan Peserta KB Aktif	1.100 PUS, 0%	100%



			Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Paripurna	Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang Paripurna, Cakupan Peserta KB Aktif	100 Kel, 0%	Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang Paripurna, Cakupan Peserta KB Aktif	100 Kel, 0%	100%
			Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna	Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang Paripurna, Cakupan Peserta KB Aktif	100 Kel, 0%	Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang Paripurna, Cakupan Peserta KB Aktif	100 Kel, 0%	100%
			Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna	Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Paripurna, Cakupan peserta KB Aktif	20 Kel, 0%	Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Paripurna, Cakupan peserta KB Aktif	20 Kel, 0%	100%
			Program Peningkatan Kepsertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin	30	Akseptor	30		100%
			Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana Bagi Keluarga Miskin	Aseptor KB bagi PUS miskin, aseptor KB bagi PUS miskin	30 Org, 0 Org	Aseptor KB bagi PUS miskin, aseptor KB bagi PUS miskin	30 Org, 0 Org	100%
								100%
			Program Penghargaan Kepahlawanan	100	%	100	%	100%
			Pemberian Tali Asih Keluarga Perintis dan Veteran	Tali Asih bagi Keluarga Perintis dan Veteran Miskin, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	20 Org, 20,37%	Tali Asih bagi Keluarga Perintis dan Veteran Miskin, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	20 Org, 20,37%	100%
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1 paket, 20,37%	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan, Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1 paket, 20,37%	100%

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun 2020 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo melaksanakan 10 Program melalui 54 kegiatan belanja langsung dan 1 (satu) kegiatan belanja langsung dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp 10.424.772.200 total realisasi belanja sebesar Rp 9.655.883.190

Adapun rincian anggaran dan realisasi masing-masing sasaran, program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
A	Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 603.224.800	Rp 517.632.145	85,81	
a.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 40.049.200	Rp 39.878.400	99,57	
b.	Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan	Rp 49.521.000	Rp 47.008.150	94,93	
c.	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 102.235.000	Rp 67.210.766	65,74	1. Peralatan listrik tidak banyak mengalami gangguan, 2. disamping PDAM sudah asa sumur Bor 3. Untuk pemakaian telephon memang jarang di gunakan semenjak adanya aplikasi whatsapp
d.	Pengelolaan Keamanan Kantor	Rp 36.456.800	Rp 34.235.400	93,91	
e.	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Rp 232.822.000	Rp 193.529.267	83,12	Undangan Rakor untuk perjalanan Dinas Luar Daerah sangat berkurang. 2. hanya sedikit tamu dari OPD Luar daerah yang koordinasi dan konsultasi di Dinas kami karena Purworejo termasuk Kabupaten Merah (Covid 19) untuk SPJ Jamuan Tamu
f.	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi	Rp 142.140.800	Rp 135.770.162	95,52	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 286.352.800	Rp 261.101.562	91,18	

a.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 69.880.200	Rp 69.738.000	99,8	
b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 148.817.600	Rp 137.854.262	92,63	ada sejumlah 3 kendaraan dinas roda 2 dan ada 1 kendaraan roda 4 yang ditahun ini belum waktunya ganti Plat
c.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana UPT	Rp 15.727.000	Rp 15.724.900	99,99	
d.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 51.928.000	Rp 37.784.400	72,76	Karena adanya WFH berdampak pada alat perlengkapan kantor seperti komputer, printer, laptop, AC jarang di operasionalkam sehingga mengurangi kerusakan adapun ada perawatan hanya sebagain saja
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 92.013.400	Rp 85.266.850	92,67	Adanya pandemi covid tidak ada undangan baik dalam dan luar daerah, semua memakai video converent
a.	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Rp 40.171.000	Rp 40.154.950	99,96	
b	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Rp 51.842.400	Rp 45.111.900	87,02	Adanya pandemi covid tidak ada undangan baik dalam dan luar daerah, semua memakai video converent
IV	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Rp 14.992.000	Rp 10.086.800	67,28	Adanya pandemi covid tidak ada undangan baik dalam dan luar daerah, semua memakai video converent
a.	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Rp 14.992.000	Rp 10.086.800	67,28	Adanya pandemi covid tidak ada undangan baik dalam dan luar daerah, semua memakai video converent
V	Program Keluarga Berencana (KB)	Rp 7.651.961.000	Rp 7.073.962.267	92,45	
a.	Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi KKB (KIE KKB)	Rp 120.617.000	Rp 119.996.850	99,49	

b.	Pelayanan Keluarga Berencana	Rp 127.381.400	Rp 119.472.300	93,79	BBM diperuntukan untuk genset Bus Muyan, Tidak Dapat Dibelanjakan karena selama pandemi covid tidak ada pelayanan safari KB dengan menggunakan Bus Muyan, Sisa SPPD luar Daerah tidak dapat diserap secara maksimal karena selama pandemi covid 19 rapat dilaksanakan dengan virtual meeting, fotocopy tidak dapat diserap maksimal karena menyesuaikan dengan kondisi spj dan proses surat menyurat yang dilakukan secara elektronik
c.	Dukungan Updating Data Keluarga	Rp 30.697.000	Rp 30.696.700	100	
d.	Pengembangan Kelompok KB Pria	Rp 2.110.400	Rp 2.097.800	99,4	
e.	Monitoring Evaluasi Kepesertaan KB	Rp -	Rp -	0	
f.	Pendayagunaan Penyuluh KB dan Organisasi Masyarakat	Rp 22.619.200	Rp 21.810.800	96,43	
g.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Rp -	Rp -	0	
h.	Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan KB Mandiri	Rp -	Rp -	0	
i	Pengadaan Sarana PPKBD dan Sub PPKBD (DAK)	Rp 484.000.000	Rp 373.768.950	77,22	sisa lelang
j	Bantuan Operasional KB (BOKB) DAK	Rp 6.214.636.000	Rp 5.793.225.567	93,22	Sisa anggaran dari biaya langganan listrik, internet, dan pembelanjaan BBM, sisa anggaran dari kegiatan pertemuan di 41 kampung kb mengingat kondisi pandmi covid sehingga pertemuan mengumpulkan masyarakat tidak maksimal, juga ada kader yang sebagian besar masyarakatnya terpapar covid sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
k.	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB (DAK)	Rp 198.900.000	Rp 190.086.900	95,57	
l.	Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data (DAK)	Rp 451.000.000	Rp 422.806.400	93,75	sisa pengadaan
VI	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Rp 242.990.200	Rp 242.314.917	99,72	
a.	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Rp 32.205.400	Rp 32.205.350	100	

b.	Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Rp 60.817.000	Rp 60.804.711	99,98	
c.	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Rp 31.283.000	Rp 31.184.806	99,69	
d.	Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak	Rp 32.169.800	Rp 32.161.350	99,97	
e.	Operasional Taman Cerdas	Rp 52.265.800	Rp 52.265.600	100	
f.	Dukungan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Rp 15.826.600	Rp 15.621.100	98,7	
g.	Penguatan Kelompok kerja PUG	Rp 214.600	Rp 213.100	99,3	
h.	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Untuk Desa	Rp -	Rp -	0	
i.	Fasilitasi Pembinaan DWP dan GOW	Rp 18.208.000	Rp 17.858.900	98,08	
VII	Program Penanganan dan Perberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rp 1.343.626.500	Rp 1.281.349.999	95,37	
a.	Fasilitasi dan Penanganan Bekas Warga Lembaga Perasyarakatan (BWLP), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Rp 27.790.500	Rp 27.527.200	99,05	
b.	Fasilitasi Program Keluarga Harapan	Rp 130.000.000	Rp 125.506.000	96,54	
c.	Pengadaan Perlengkapan Sekretariat Program Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Rp -	Rp -	0	
d.	Fasilitasi Penanganan Korban Bencana	Rp 124.885.800	Rp 123.081.600	98,56	
e.	Penanganan Pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak terlantar luar panti	Rp 32.039.400	Rp 31.579.050	98,56	
	Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi	Rp 200.585.000	Rp 200.107.675	99,76	
f.	Validasi sasaran Program Penanganan Fakir Miskin	Rp 280.668.000	Rp 268.406.524	95,63	
h.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Bermasalah	Rp 30.883.400	Rp 30.398.800	98,43	
i.	Operasional Rumah Singgah Untuk PMKS	Rp 22.543.400	Rp 22.102.400	98,04	
j.	Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Rp 124.637.000	Rp 118.922.800	95,42	
k.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin	Rp 108.464.000	Rp 91.457.000	84,32	Sisa perjalanan dinas luar , tidak ada rakor, bintek, sosialisasi dari Provinsi karena pandemi

I.	Fasilitasi Kelembagaan dan Organisasi Sosial	Rp 261.130.000	Rp 242.260.950	92,77	Sisa perjalanan dinas luar , tidak ada rakor, bintek, sosialisasi dari Provinsi karena pandemi
m.	Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota (DAK)	Rp -	Rp -		
VIII	Program Keluarga Sejahtera	Rp 124.034.000	Rp 122.572.800	98,82	
a.	Pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapat Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Rp 32.375.600	Rp 31.972.600	98,76	
b.	Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Paripurna	Rp 48.168.800	Rp 47.377.350	98,36	
c.	Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna	Rp 35.814.600	Rp 35.651.850	99,55	
d.	Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna	Rp 7.675.000	Rp 7.571.000	98,64	
IX	Program Peningkatan Kepsertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin	Rp 3.289.200	Rp 3.289.200	100	
a.	Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana Bagi Keluarga Miskin	Rp 3.289.200	Rp 3.289.200	100	
X	Program Penghargaan Kepahlawanan	Rp 62.288.300	Rp 58.306.650	93,61	
a.	Pemberian Tali Asih Keluarga Perintis dan Veteran	Rp 19.080.000	Rp 18.692.700	97,97	
b.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Rp 43.208.300	Rp 39.613.950	91,68	Evisiensi anggaran
		Rp 10.424.772.200	Rp 9.655.883.190	92,62	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepada semua perangkat daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai salah satu perangkat daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain sebagai wujud pertanggungjawaban juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, yang dibuat satu tahun sekali setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

LKjIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo secara umum diringkas menjadi 3 hal.

1. Keberhasilan dan Kegagalan
2. Permasalahan dan Kendala utama
3. Strategi Pemecahan Masalah

#### **A. CAPAIAN KINERJA DINAS**

Berdasarkan tabel pada BAB III menunjukkan ada kegiatan yang tidak mencapai 100%, meski demikian tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo masih dalam kategori berhasil. Dalam hal ini juga, semua kegiatan tahun 2020 yang bisa dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun tersebut tanpa hambatan yang berarti sehingga dapat dikatakan tidak ada kegagalan, sebagaimana tabel rangkuman penyerapan dan capaian kinerja per program per kegiatan adalah sebagai berikut

Tabel 4.1

Realisasi Penyerapan dan Kinerja Program Tahun Anggaran 2020

No	Nama Program	Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan	Capaian (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 517.632.145	6	85,81
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 261.101.562	4	91,18
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 85.266.850	2	92,67
4	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Rp 10.086.800	1	67,28
5	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Rp 242.314.917	9	99,72
6	Program Keluarga Berencana	Rp 7.073.962.267	12	92,45
7	Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rp 1.281.349.999	13	95,37
8	Penghargaan Kepahlawanan	Rp 58.306.650	2	93,61
9	Keluarga Sejahtera	Rp 122.572.800	4	98,82
10	Peningkatan Kesertaan KB bagi PUS miskin	Rp 3.289.200	1	100
	JUMLAH	Rp 9.655.883.190	54	96.47



## **B. Faktor Keberhasilan dan Kendala – Kendala dalam Pencapaian Tujuan**

### **1. Belum optimalnya penanganan PMKS**

- Masih kurangnya PMKS yang memiliki akses dan ikut berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
- Tingginya masyarakat yang memiliki RTLH
- Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan PMKS

### **2. Isu strategis urusan Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah:**

Pada dasarnya masalah kependudukan berkaitan dengan tiga aspek yaitu: kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Adapun isu strategis terkait program pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera antara lain :

- Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- Masih rendahnya kesadaran kaum pria tentang kesertaan KB
- Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum ikut KB
- Tingginya angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun )
- Masih tingginya angka kelahiran pada remaja usia 15 – 18 tahun (ASFR 15 – 19 tahun ) yang disebabkan karena masih kurangnya pemahaman dan kesadaran bagi remaja mengenai kesadaran bagi remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
- Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan/ kelompok kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL)
- Belum optimalnya pemberdayaan UPPKS yang merupakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga
- Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kependudukan yang tepat dan akurat

### **3. Isu strategis urusan PPPA**

- Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat
- Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Tingkat capaian Pemenuhan Hak Anak belum optimal
- Penguatan jaringan kelembagaan lembaga layanan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan
- Kapasitas Pengurus Organisasi Perempuan dan Anak masih perlu ditingkatkan
- Belum terbentuknya sistem informasi data gender yang lengkap

**C. Langkah-Langkah untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pencapaian Tujuan.**

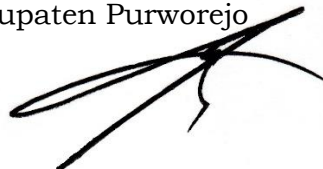
1. Diadakannya sosialisasi untuk mengoptimalkan penanganan PMKS.
2. Diadakan kelompok usaha bersama/KUBE dalam peningkatan sosial ekonomi bagi PMKS
3. Mengadakan sosialisasi terhadap pasangan usia subur agar mau ikut KB, dan sosialisasi kepada kaum pria tentang kepesertaan KB
4. Sosialisasi kepada remaja usia 15 – 18 tahun, dalam pemahan dan kesadaran bagi remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
5. Membentuk PPKS dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga
6. Sosialisasi kepada kelompok kegiatan Tri Bina, BKB, BKR dan BKL
7. Mengadakan sosialisasi dan parenting terhadap orang tua anak yang mengalami masalah, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi lagi dan capaian pemenuhan hak anak bisa optimal.
8. Dengan melalui jaringan kelembagaan; lembaga layanan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan
9. Mengadakan sosialisasi tentang pemahaman pada masyarakat dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan responsif gender
10. Dengan pemahan responsif gender sehingga sosial informasi data gender semakin lengkap

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban, juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Purworejo,

Kepala Dinas Sosial Pengendalian penduduk  
Keluarga Berencana Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Purworejo



dr. Kuswantoro, M. Kes

Pembina Utama Muda

NIP.19621204 198803 1 011